



PEMERINTAH KOTA BEKASI

RENCANA KERJA

20

26

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BEKASI

2025

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 telah selesai dengan baik. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2026. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan, memuat diantaranya tujuan, sasaran serta target capaian kinerja yang akan dilaksanakan dan dicapai pada Tahun 2026. Dalam rangka mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan semua unit kerja berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2026 secara konsisten. Selanjutnya, diharapkan dengan adanya dokumen Renja ini dapat mendeskripsikan kondisi aktual dan akselerasi pencapaian kinerja perencanaan pembangunan khususnya di Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Demikian, semoga dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 ini dapat menghasilkan perencanaan yang implementatif untuk mendukung Terwujudnya Kota Bekasi yang Kota Bekasi Maju, Berdaya Saing, Berkelanjutan, dan Ihsan pada Tahun 2025-2045.

Bekasi, 15 Agustus 2025

Sekretaris Daerah



Junardi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
.....	4
Bab I PENDAHULUAN	5
1.1. Latar Belakang	5
1.2. Landasan Hukum	6
1.3. Maksud dan Tujuan	8
1.4. Sistematika Penulisan	9
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	11
2. Analisa Kinerja Pelayanan	25
3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	38
4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	39
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	48
Bab III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	1244
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	1244
3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah	1247
3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	1248
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	1264
Bab V PENUTUP	1275
5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja	1275
5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan	1275



BAB I

PENDAHULUAN

KANTOR WALIKOTA BEKASI

Bab I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bekasi merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode satu tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam periode Tahun 2026. Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi ini berfungsi sebagai acuan kerja bagi pelaksanaan kegiatan pada tahun bersangkutan. Sebagai dokumen rencana tahunan, Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat:

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam KUA, PPAS, dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2026.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan program prioritas serta tugas dan fungsi.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan perkiraan maju.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah 2026 sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah yaitu fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya serta mempedomani dokumen RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029 sebagaimana telah dilegalisasi melalui Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Pada Sekretariat Daerah Kota Bekasi;
18. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja 2026 ini adalah untuk memberikan arah, pedoman dan landasan operasional bagi aparatur pemerintah khususnya Sekretariat Daerah Kota Bekasi dalam mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dengan pengalokasian anggaran secara efektifitas dan efisien sehingga dapat menunjang dalam mewujudkan visi dan misi Kota Bekasi. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja 2026 ini diantaranya adalah :

1. Terwujudnya integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas kegiatan antar bagian, antar kegiatan, antar fungsi di Sekretariat Daerah.
2. Terwujudnya keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, serta evaluasi kegiatan.
3. Tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

KANTOR WALKOTA BEKASI

Bab II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi sebagai sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, dilaksanakan guna melakukan penilaian atas pemenuhan target program atau kegiatan, sehingga atas dasar evaluasi pelaksanaan tersebut dapat diketahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Evaluasi Renja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun n-1 dan tahun n-2 didasarkan dan merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Bekasi 2024-2026 dan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026.

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2025 serta evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024–2026 yang disajikan dalam tabel di bawah ini merupakan informasi tentang akumulasi realisasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi selama tahun 2024-2026 yang telah dilaksanakan secara optimal dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan serta perkiraan realisasi tahun 2025 yang kemudian dibandingkan dengan pencapaian akhir yang diharapkan dari penetapan target kinerja dalam Rencana Strategis

Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024-2026. Berdasarkan hasil evaluasi ini dapat diketahui program/kegiatan mana yang memenuhi atau tidak memenuhi dan/atau melebihi persentase pencapaian target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi menetapkan 3 Program, 19 Kegiatan dan 60 Sub Kegiatan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel II. 1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Sekretariat Daerah s/d Tahun 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	01			Program Administrasi Umum	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	01		Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
4	01	01	01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	60 Dokumen	-	20 Dokumen	20 Dokumen	100%	20 Dokumen	40 Dokumen	66,67%
4	01	01	02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
4	01	01	02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16.422 Orang/ Bulan	-	5.474 Orang/ Bulan	5.474 Orang/ Bulan	100%	5.474 Orang/ Bulan	10.948 Orang/ Bulan	66,67%
4	01	01	02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan	42 Laporan	-	16 Laporan	16 Laporan	100%	14 Laporan	30 Laporan	71,43%
4	01	01	05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
4	01	01	05	11	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	150 Orang	-	50 Orang	50 Orang	100%	50 Orang	100 Orang	66,67%
4	01	01	06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	01	06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	180 Paket	-	40 Paket	40 Paket	100%	60 Paket	100 Paket	55,56%
4	01	01	06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	87.249 Paket	-	30.044 Paket	30.044 Paket	100%	29.083 Paket	59.127 Paket	67,77%
4	01	01	06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	33.000 Paket	-	9.530 Paket	9.530 Paket	100%	11.000 Paket	20.530 Paket	62,21%
4	01	01	06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	6 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
4	01	01	06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	195 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	65 Laporan	69 Laporan	35,38%
4	01	01	06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	66,67%
4	01	01	06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
4	01	01	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	01	01	08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	01	08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	66,67%
4	01	01	08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	24 Laporan	66,67%
4	01	01	15		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah									
4	01	01	15	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota	84 Orang/Bulan	-	28 orang/bulan	28 Orang/bulan	100%	28 orang/bulan	52 Orang/bulan	66,67%
4	01	01	15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	162 Paket	-	54 Paket	26 Paket	48,15%	54 Paket	80 Paket	49,38%
4	01	01	15	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Orang	-	4 orang	-	0%	4 Orang	4 Orang	33,33%
4	01	01	15	04	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Pembayaran Tunjangan Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota	72 Orang/Bulan	-	24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	100%	24 Orang/Bulan	48 Orang/bulan	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	01	16		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah									
4	01	01	16	01	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	jumlah kebutuhan kepala daerah yang disediakan	36 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	66,67%
4	01	01	16	02	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	jumlah kebutuhan wakil kepala daerah yang disediakan	36 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	66,67%
4	01	01	16	03	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	jumlah kebutuhan sekretariat daerah yang disediakan	36 Paket	-	12 Paket	12 Paket	100%	12 Paket	24 Paket	66,67%
4	01	01	18		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4	01	01	18	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	66,67%
4	01	01	18	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	66,67%
4	01	01				Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	01	18		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan									
4	01	01	18	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah laporan dokumentasi tugas pimpinan	39 Laporan	-	12 Laporan	12 Laporan	100%	13 Laporan	25 Laporan	64,10%
4	01	01				Presentase Ketersediaan gedung	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
						pemerintahan dalam kondisi baik								
4	01	01	09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
4	01	01	09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	75 Unit	-	25 unit	25 unit	100%	25 Unit	75 Unit	66,67%
4	01	01	09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	429 Unit	-	143 Unit	143 Unit	100%	143 Unit	286 Unit	66,67%
4	01	01	09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	600 Unit	-	10 Unit	10 Unit	100%	200 Unit	210 Unit	35%
4	01	01	09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 Unit	-	30 Unit	30 Unit	100%	30 Unit	60 Unit	66,67%
4	01	01	09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	90 Unit	-	19 Unit	19 Unit	100%	30 Unit	49 Unit	54,44%
4	01	01				Presentase ketersediaan sarana	100%	-	100%	50,8%	50,8%	100%	75,4%	75,4%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
		dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan												
4	01	01	03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									
4	01	01	03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)	3 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	1 Dokumen	33,33%
4	01	01	03	04	Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	66,67%
4	01	01	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
4	01	01	07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	60 Unit	-	31 Unit	21 Unit	100%	67,74%	154 Unit	265,52%
4	01	01	07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan mebel	3.000 Unit	-	-	-	0%	1.000 Unit	1.000 Unit	33,33%
4	01	01	07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3.000 Unit	-	598 Unit	105 Unit	17,56%	1.000 Unit	1.105 Unit	36,83%
4	01	01				persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
		pemerintah Kota Bekasi												
4	01	01	17		Penataan Organisasi									
4	01	01	17	02	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	6 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
4	01	01	17	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	66,67%
4	01	01	17	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
4	01	01				Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	75%	-	75%	100%	133,33%	75%	104,165%	138,89%
4	01	01	17	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	75%	-	75%	79,5%	106,06%	75%	90,53%	120,71%
4	01	02	01		Administrasi Tata Pemerintahan									
4	01	02	01	01	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	9 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	02				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	02	01		Administrasi Tata Pemerintahan									
4	01	02	01	03	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	42 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	14 Dokumen	17 Dokumen	40,48%
4	01	02				Presentase peningkatan profile kelurahan	25%	-	15%	100%	400%	25%	212,5%	850%
4	01	02	01		Administrasi Tata Pemerintahan									
4	01	02	01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	54 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	18 Dokumen	24 Dokumen	44,44%
4	01	02				Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	02	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
4	01	02	03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	24 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	8 Dokumen	16 Dokumen	66,67%
4	01	02	03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang didokumentasi	9 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	02				Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	02	03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum									
4	01	02	03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	24 Kasus	-	8 Kasus	8 Kasus	100%	8 Kasus	16 Kasus	66,67%
4	01	02				Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar Nasional dan hari besar lainnya	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	02	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									
4	01	02	02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	27 Dokumen	-	8 Dokumen	8 Dokumen	100%	9 Dokumen	17 Dokumen	62,96%
4	01	02				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	02	02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat									
4	01	02	02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan	75 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	25 Dokumen	26 Dokumen	34,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)				
		Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat												
4	01	02	02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	117 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	39 Dokumen	40 Dokumen	34,19%
4	01	02			Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah		100%	-	100%	172,73%	172,73%	100%	136,36%	136,36%
4	01	02	04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah									
4	01	02	04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	66,67%
4	01	02	04	02	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	3 Laporan	-	65 Laporan	65 Laporan	100%	1 Laporan	66 Laporan	2.200%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian									
4	01	03	01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	9 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
4	01	03	01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	66,67%
4	01	03	01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67%
4	01	03				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	01	03	02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan									
4	01	03	02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	9 Dokumen	-	3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	6 Dokumen	66,67%
4	01	03	02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan	39 Laporan	-	13 Laporan	13 Laporan	100%	13 Laporan	26 Laporan	66,67%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (Output)	Target Capaian Kinerja Program (Renstra Sekretariat Daerah) Tahun 2024-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun n-3 / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Capaian Target Renstra Setda s/d Tahun Berjalan/n-1					
					Target Renja SKPD Tahun 2024	Realisasi Renja SKPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan kegiatan s/d Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)				
1					2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
		Evaluasi Program Pembangunan												
4	01 03 02 03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	54 Laporan	-	18 Laporan	18 Laporan	100%	18 Laporan	36 Laporan	66,67%			
4	01 03	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah		100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
4	01 03 03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa												
4	01 03 03 01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67%			
4	01 03 03 02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	3 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	2 Dokumen	66,67%			
4	01 03 03 03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	-	100 Orang	100 Orang	100%	100 Orang	200 Orang	66,67%			

Berdasarkan pelaksanaan evaluasi hasil Renja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, diperoleh hasil yang menggambarkan rata-rata tingkat capaian sub kegiatan di seluruh program sebesar 101,25% dan rata-rata tingkat capaian/penyerapan anggaran sub kegiatan di seluruh program sebesar 86.19%.

2. Analisa Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan yang diukur melalui indikator sasaran Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah mencapai target yang telah ditetapkan pada tahun 2024. Analisa kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kota Bekasi tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Tabel II. 2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No.	Sasaran / Program / Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Setda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Indikator Kinerja Utama												
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat			40%	40%	40%	-	49.59%	40%	40%	-	
2	Indeks Pelaksanaan Pembangunan			88	88	88	-	88.8	88	88	-	
3	Nilai AKIP SETDA			A	A	A	-	82.04% (A)	A	A	-	
4	Nilai IKM SETDA			83	83	83	-	88.13%	83	83	-	
5	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas			22.73	22.73	22.73	-	29.55%	22.73	22.73	-	
Indikator Kinerja Program												
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota												
1	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
2	Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
3	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah			75%	75%	75%	-	100%	75%	75%	-	
4	Persentase keterlaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
5	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan			100%	100%	100%	-	51%	100%	100%	-	
6	Persentase ketersediaan Gedung pemerintahan dalam kondisi baik			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat												

No.	Sasaran / Program / Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Setda				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
2	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
3	Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah			75%	75%	75%	-	79,55%	75%	75%	-	
4	Persentase Peningkatan Profil Kelurahan			25%	25%	25%	-	100%	25%	25%	-	
5	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya			100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	-	
6	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial			100%	100%	100%	-	100%		100%	-	
7	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	-	172,73%		100%	-	
8	Persentase Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah			100%	100%	100%	-	100%		100%	-	
Program Perekonomian Dan Pembangunan												
1	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan			100%	100%	100%	-	100%		100%	-	
2	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi			100%	100%	100%	-	100%		100%	-	
3	Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah			100%	100%	100%	-	100%		100%	-	

1. Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat.

Pada tahun 2023 pelaporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan melalui kinerja Bagian Tata Pemerintahan dengan perolehan skor LPPD Kota Bekasi sebesar 3,1703 (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023) dari target yang di tetapkan pada RPJMD pada tahun 2023 sebesar 3,360 . Sementara hasil EPPD tahun 2024 terhadap LPPD Tahun 2023 sampai saat ini belum ada.

Persentase capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang meningkat, menunjukkan kontribusi langsung perangkat daerah terhadap pencapaian target yang lebih spesifik di bidang tanggung jawabnya. Jika perangkat daerah berhasil meningkatkan capaian IKK secara signifikan, ini akan berkontribusi positif terhadap nilai EPPD. Adapun Capaian kinerja indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 3
 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
 Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase Capaian IKK yang meningkat	persen	40	49,59	123,97%

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024, Diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 40 Persen, sementara realisasi mencapai 49,59 Persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas Indikator Sasaran Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2024 sebesar 123,97 persen, dengan demikian capaian kinerja pada indikator ini pada Tahun 2024 telah terlampaui dengan penjelasan bahwa 60 dari total 121 IKK meningkat dari tahun sebelumnya.

Faktor penyebab utama yang mendorong keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Peningkatan Kualitas Kepemimpinan Daerah
2. Perencanaan yang Matang dan Terukur
3. Pengelolaan Sumber Daya yang Efisien
4. Fokus pada Peningkatan Kualitas Layanan Publik
5. Peningkatan Kinerja Aparatur Pemerintah atau Organisasi

6. Sistem Monitoring dan Evaluasi yang Efektif
7. Komunikasi yang Jelas dan Terkoordinasi
8. Penggunaan Teknologi yang Mendukung
9. Keterlibatan dan Partisipasi Masyarakat
10. Keterbukaan dan Transparansi
11. Pemanfaatan Data dan Analisis

Secara keseluruhan, pencapaian target Persentase Capaian IKK yang meningkat dipengaruhi oleh kombinasi dari faktor-faktor internal dan eksternal, yang berfokus pada kualitas kepemimpinan, pengelolaan sumber daya, partisipasi masyarakat, serta sistem yang mendukung pelaksanaan dan pemantauan kinerja.

Pencapaian indikator Persentase Capaian IKK yang meningkat pada tahun 2024 ini didukung oleh indikator capaian Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat sebagai berikut:

Tabel II. 4
 Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
 Persentase Capaian IKK yang meningkat

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase Peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	Persen	75	79,55	106,06

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Tata Pemerintahan tahun 2024, Diolah

2. Indikator Sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan

Indikator sasaran strategis meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan adalah Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang diperoleh dengan formula :

$$(Realisasi Pelaksanaan Kegiatan \times 80\%) + \left\{ \left(\frac{\text{Jumlah Pengadaan Sesuai Ketentuan}}{\text{Jumlah Pengadaan yang Difasilitasi}} \times 40\% \right) + (\text{Indeks Kepuasan Masyarakat Bagian PBJ}) \times 60\% \right\} \times 20\%$$

Indikator ini merupakan gabungan persentase ketepatan pelaksanaan kegiatan, persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketentuan dan indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan.

Adapun capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 5
 Analisis Pencapaian Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	persen	88	88,87	100,99%

Sumber: Data Bagian Pembangunan dan Bagian PBJ Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada tahun 2024 sebesar 88 persen, sementara realisasi mencapai 88,87 persen, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang sebesar 100,99 persen, maka capaian indikator Nilai Indeks Pelaksanaan Pembangunan pada Tahun 2024 telah terlampaui sebesar 0,99 persen dari target yang telah ditetapkan.

Dalam mengukur kinerja Pelaksanaan Pembangunan di Kota Bekasi, dihitung menggunakan beberapa komponen yaitu :

1. Komponen pembentuk Indikator Indeks Pelaksanaan Pembangunan yang pertama adalah nilai kinerja pengendalian pembangunan diperoleh dari realisasi kinerja fisik perangkat daerah dimana pada tahun 2024 ini kinerja fisik perangkat daerah sebesar 96,89 persen jika dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar 82,86 persen.
2. Komponen yang kedua adalah persentase fasilitasi pengadaan barang/jasa yang memenuhi ketentuan, dimana dari 11498 paket pekerjaan yang terdaftar di aplikasi SIRUP pada tahun 2024 yang ada di kota Bekasi kesemuanya difasilitasi oleh bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Komponen ketiga yaitu indeks kepuasan masyarakat atas layanan pengadaan barang/ jasa yang sesuai dengan ketentuan, dimana atas dasar survey kepuasan masyarakat yang dilakukan dalam kurun waktu Januari-Desember 2024 nilai yang didapatkan oleh unit layanan Publik PBJ adalah 94,02 atau dengan kategori sangat baik.

Dari ketiga komponen tersebut didapatkan perhitungan dengan rumus sebagai berikut :

$$(96,89 \times 80\%) + \left\{ \left[\left(\frac{11498}{11498} \times 40\% \right) + (94,02) \times 60\% \right] \times 20\% \right\}$$

sehingga didapatkan hasil sebesar 88,87 persen.

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Realisasi Pelaksanaan Kegiatan (realisasi 96,89%)
2. Kinerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
 Kinerja Bagian ini berkontribusi 20% yang terdiri dari dua komponen yang saling mempengaruhi:
 - a. Jumlah Pengadaan Sesuai Ketentuan/Jumlah Pengadaan yang difasilitasi (realisasi 100%)
 - b. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (realisasi 94,02)
3. Dukungan Infrastruktur dan Teknologi
4. Sinergi Antar Unit Kerja

Capaian kinerja sasaran pada indikator sasaran Indeks Pelaksanaan Pembangunan, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang mendukung Program Perekonomian Dan Pembangunan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 6
Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama
Indeks Pelaksanaan Pembangunan

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Cakupan Perumusan dan Pengendalian Pembangunan	Persen	100	100	100
2.	Persentase Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Pembangunan dan Bagian PBJ tahun 2024, Diolah

3. Indikator Sasaran Nilai AKIP SETDA.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Bekasi menunjukkan bahwa Sekretariat Daerah Kota Bekasi memperoleh nilai 82,04 atau predikat “A” dengan intrepretasi Memuaskan. Tabel hasil evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024 di tunjukan dalam tabel berikut:

Tabel II. 7
 Hasil Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024

No	Komponen Yang Dinilai	Tahun 2023	
		Bobot (%)	Nilai (%)
1	Perencanaan Kinerja	30	24,21
2	Pengukuran Kinerja	30	24,47
3	Pelaporan Kinerja	15	12,07
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,29
	Nilai Hasil Evaluasi	100	82,04
	Tingkat Akuntabilitas		A

Sumber : LHE SAKIP Sekretariat Daerah, Tahun 2024

Adapun capaian indikator Persentase Peningkatan Kualitas AKIP OPD (Kategori "A" Ke atas) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 8
 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Nilai AKIP SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Nilai AKIP SETDA	Nilai	A	A	100%

Sumber : LHE SAKIP Sekretariat Daerah Tahun 2024, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar nilai A, sementara realisasi mencapai nilai A maka capaian kinerja tahun 2024 atas Nilai AKIP SETDA sebesar 100 persen, maka capaian Nilai AKIP SETDA pada Tahun 2024 telah tercapai.

Faktor penentu keberhasilan pencapaian indikator Nilai AKIP SETDA ini dikarenakan Sekretariat Daerah Kota Bekasi telah menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Inspektorat Daerah Kota Bekasi, dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Menyempurnakan crosscutting kinerja Untuk memastikan kolaborasi kinerja antara Sekretariat Daerah dengan perangkat-perangkat daerah terkait.
- b. Menyempurnakan Proses Bisnis sebagai dasar memperbaiki cascade kinerja mulai organisasi hingga individu;
- c. Menyempurnakan Indikator Kinerja Individu serta sistem pengukuran kinerja individu;

- d. Memanfaatkan integrasi sistem Perencanaan Kinerja , Penganggaran dan Sistem Informasi Kinerja (e-performance based budgeting);
- e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
- f. Meningkatkan kualitas evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA sehingga dapat mencapai target karena didukung oleh indikator capaian program sebagai berikut:

Tabel II. 9
 Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Sasaran
 Nilai AKIP SETDA

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Persen	75	100	133,33%
2.	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100%
3.	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	Persen	100	100	100%

Sumber : Evaluasi Internal Bagian Organisasi, Tata Usaha dan Pembangunan tahun 2024, Diolah

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA didukung oleh 3 (tiga) indikator program dengan rata-rata capaian program sebesar 111,11 persen maka keberhasilan ini maka berpengaruh pada tingkat ketercapaian indikator sasaran Nilai AKIP SETDA.

4. Indikator Sasaran Nilai IKM SETDA

Capaian kinerja indikator untuk indikator sasaran Nilai IKM SETDA dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 10
 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama
 Nilai IKM SETDA

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	nilai	83	88.13	106.18%

Sumber: Laporan Pelaksanaan SKM Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024 Triwulan IV, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target Nilai IKM SETDA pada tahun 2024 sebesar 83 poin, sementara realisasi mencapai 88,13 poin, maka capaian kinerja tahun 2024 atas indikator Nilai IKM SETDA yang sebesar 106,18 persen, maka capaian indikator Nilai IKM SETDA pada Tahun 2024 telah terlampaui.

Dalam mengukur kinerja pelayanan publik di Kota Bekasi, digunakan indikator Persentase unit pelayanan dengan nilai SKM baik. Pada Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Tahun 2024 terhadap 12 Unit layanan publik dan 31 unsur pelayanan di lingkungan Sekretariat Daerah dapat dilihat nilai hasil survey kepuasan masyarakat tahun 2023 pada tabel berikut:

Tabel II. 11
 Hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekretariat
 Daerah Kota Bekasi tahun 2024

No	Unit Penyelenggara Pelayanan	Nilai IKM SMT1	Nilai IKM TW III	Nilai IKM TW IV	Nilai Rata-Rata IKM SM II	Nilai Rata-Rata IKM Tahun 2024	Mutu Pelayanan	Kinerja Pelayanan
1	Sekretariat Daerah	88,83	87,86	86,98	87,42	88,13	B	Baik

Sumber : Keputusan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Nomor 000.8.3.4/Kep.78-Setda.Org/XII/2024

Adapun faktor penyebab keberhasilan pencapaian target tahun 2024 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain :

1. Keterampilan dan Profesionalisme Petugas;
2. Kecepatan dan Ketepatan Layanan;
3. Kemudahan Akses Layanan;
4. Transparansi dalam Proses Pelayanan;
5. Pelaporan yang Terbuka;
6. Fasilitas yang Memadai;
7. Infrastruktur Pendukung;

8. Pemberian Informasi yang Jelas dan Tepat Waktu;
9. Respon Cepat terhadap Keluhan;
10. Pelatihan dan Pengembangan SDM;
11. Motivasi dan Kepuasan Kerja Pegawai;
12. Identifikasi Kebutuhan Masyarakat;
13. Adaptasi terhadap Perubahan;
14. Konsistensi dalam Kualitas Layanan;
15. Mekanisme Pengawasan yang Baik;
16. Evaluasi Berkala;
17. Pemanfaatan Teknologi untuk Pelayanan;
18. Inovasi Layanan;

Untuk meraih capaian kinerja pada indikator sasaran Nilai IKM SETDA pada Sekretariat Daerah, tentunya didukung oleh capaian kinerja indikator program yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II. 12
 Indikator capaian program Pendukung Indikator Kinerja Utama
 Nilai IKM SETDA

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	Persen	100	100	100
2.	Cakupan Informasi Pemerintah Daerah yang dipublikasikan	Persen	100	100	100
3.	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Persen	100	100	100
4.	Persentase Fasilitas kegiatan keagamaan, hari besar Nasional dan hari besar lainnya	Persen	100	100	100
5.	Persentase fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	Persen	100	100	100

Sumber: *Evaluasi Internal Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, Diolah*

5. Indikator Sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas
 Capaian indikator Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas diukur dari perbandingan antara perangkat daerah dengan nilai

AKIP A dengan nilai AKIP seluruh perangkat daerah dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel II. 13
 Analisis Pencapaian Indikator Kinerja Utama Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024
			Target	Realisasi	
1	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas	persen	22,73	29,55%	129,98%

Sumber: Data Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2024, diolah

Dengan melihat tabel tersebut diatas bahwa target tahun 2024 sebesar 22,73 Persen, sementara realisasi mencapai 22,95 persen maka capaian kinerja tahun 2024 atas Persentase Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas sebesar 129,98 persen atau melebihi target yang ditetapkan.

Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas pada tahun 2024 ini jumlahnya meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dimana pada tahun 2023 terdapat 9 dari 44 perangkat daerah yang mendapatkan nilai AKIP A sedangkan pada tahun 2024 terdapat 13 dari 44 perangkat daerah dengan nilai AKIP A atau meningkat sebesar 9,10%.

Untuk meningkatkan capaian kinerja perlu diambil langkah-langkah konkrit yang harus dilakukan oleh Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Pemerintah Kota Bekasi agar menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang tertuang dalam surat Deputi Bidang Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.
- b. Mereviu dokumen perencanaan, serta melakukan perbaikan atas perumusan indikator kinerja agar lebih dapat menggambarkan kinerja (outome) yang diharapkan, sesuai level jabatan dan memenuhi kriteria SMART;
- c. Mereviu keselarasan antar kegiatan, program serta sasaran strategis untuk memastikan seluruh penggunaan anggaran efektif dalam pencapaian kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan

- manajemen kinerja dan melakukan pengukuran efisiensi atas perbaikan manajemen kinerja yang telah dilakukan;
- d. Merumuskan program prioritas daerah untuk menyelesaikan isu strategis daerah dengan mengoptimalkan kolaborasi antar daerah;
 - e. Mereviu peta proses bisnis dengan membangun struktur kinerja yang sesuai dengan pencapaian kinerja yang diharapkan untuk memastikan kerangka logis pencapaian kinerja telah dijabarkan dengan baik dan setiap pengampu kinerja mendapatkan kinerja yang sesuai;
 - f. Melaksanakan reviu kinerja secara berjenjang pada tingkatan organisasi maupun individu melalui aplikasi kinerja yang telah dibangun agar tercipta budaya kinerja yang solid pada setiap level;
 - g. Penguatan sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan sistem informasi yang mendukung pengukuran kinerja seperti e-SAKIP;
 - h. Melakukan Monitoring dan Evaluasi atas pencapaian kinerja Sasaran Pembangunan Daerah, Kinerja Sasaran Strategis, Capaian Program dan Kegiatan, serta penyerapan anggaran. Monev dilakukan untuk memastikan program kegiatan merupakan cara yang paling efektif dan efisien;
 - i. Pemberian *reward and punishment* kepada perangkat daerah dengan kinerja baik;
 - j. Menjadikan perbaikan implemintasi SAKIP sebagai pengungkit untuk mempercepat upaya reformasi birokrasi di pemerintah daerah.

Keberhasilan pencapaian indikator sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas yang melampaui target karena didukung oleh indikator capaian program pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut:

Tabel II. 14

Indikator capaian program pendukung indikator kinerja sasaran Persentase OPD yang menerapkan SAKIP berkualitas

No	Indikator Program	Satuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	Persen	75%	100%	133,33%

Sumber : *Evaluasi Internal Bagian Organisasi, tahun 2024, Diolah*

3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Pada pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Daerah selaku institusi yang memberikan supporting system kepada Wali Kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan memiliki peran sentral mengkoordinasikan seluruh Perangkat Daerah dalam merumuskan kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah, menyelenggarakan administrasi pemerintahan, penatalaksanaan organisasi, serta memberikan fasilitasi administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah. Untuk itu Sekretariat Daerah harus mampu mengukur kinerja pelayanan yang sudah dilaksanakan, mengidentifikasi permasalahan dan hambatan, serta mengetahui tantangan atau peluang yang dimiliki dan memformulasikan isu-isu penting yang merupakan rekomendasi atau catatan strategis untuk diaplikasikan dalam program dan kegiatan yang akan dilaksanakan

Isu-isu strategis daerah yang dapat difokuskan dan dilokuskan menjadi isu strategis Sekretariat Daerah adalah : Penguatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Yang Mengedepankan Prinsip Efisiensi, Efektifitas Dan Transparansi. Penyelenggaraan reformasi birokrasi yang berorientasi pelayanan publik masih isu strategis dikarenakan :

1. Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tidak menggambarkan kinerja urusan yang ditangani oleh pemerintah daerah
2. Kurangnya Koordinasi dalam rangka Cipta Kondisi dan Stabilitas Wilayah
3. Belum terdapat gambaran secara menyeluruh tentang karakteristik kelurahan dalam mengukur status kemajuan kelurahan swadaya ke swakarya menuju swasembada
4. Lambatnya proses verifikasi data calon penerima hibah Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat
5. Belum optimalnya perumusan produk hukum terkait penyelenggaraan pemerintahan
6. Belum optimalnya kinerja penyelenggaraan bidang perekonomian

7. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi bidang administrasi pembangunan
8. Belum Optimalnya kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;
9. Belum Optimalnya kualitas perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif bidang kerjasama
10. Belum optimalnya kualitas perumusan kebijakan dan pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi serta pembinaan administratif bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi
11. Belum Optimalnya kualitas penyiapan pengkoordinasian perumusan kebijakan, pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pemantauan dan evaluasi di bidang perencanaan

4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal RKPD tahun 2026 merupakan acuan dalam penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah. Review terhadap rancangan RKPD Tahun 2026 dilakukan Sekretariat Daerah Kota Bekasi untuk menelaah kesesuaian dengan kebutuhan, yang hasilnya menjadi bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan RKPD Tahun 2026. Proses telaahan yang dilakukan adalah sebagai berikut: 1. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang tercantum di dalam RKPD Tahun 2026; 2. Membandingkan dengan rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi berdasarkan analisis tahap tahap sebelumnya; 3. Menyajikan dalam bentuk matrik, dengan menempatkan program/kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang sama pada garis yang sejajar untuk memudahkan analisis;

4. Memastikan bahwa program/kegiatan/sub kegiatan di Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang merupakan kegiatan lanjutan dan/atau prioritas sudah termuat dalam RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026; 5. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Untuk jenis program dan kegiatan yang sesuai; 6. Membuat rumusan kebutuhan program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi review terhadap RKPD yang lengkap dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target/tolok ukur, dan besaran dana yang dibutuhkan untuk setiap program/kegiatan. Berdasarkan hasil telaahan yang telah dilakukan, tidak ada perbedaan program, namun terdapat beberapa indikator kinerja dan target capaian pada level kegiatan dan sub kegiatan yang berbeda antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Hal tersebut merupakan hasil telaahan bersama dan efisiensi kegiatan serta jumlah anggaran yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2026. Adapun untuk lebih rinci disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel II. 14
 Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kota Bekasi

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Ket.
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Sekretariat Daerah			248,522,738,000	Sekretariat Daerah			225,305,271,320	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			184,955,000,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			167,866,751,000	
		Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 Persen	113,930,000,000	Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran			160,000,000	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	200,000,000		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 Persen	160,000,000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20 Dokumen	200,000,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	160,000,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 Persen	72,050,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	160,000,000	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9996 Orang/bulan	72,000,000,000	Outcome : Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan			69,022,157,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	16 Laporan	50,000,000		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 Persen	69,022,157,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	1,270,000,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	69,022,157,000	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	420 Unit	770,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9520 Orang/ bulan	68,972,157,000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang	500,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	50,000,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	8,230,000,000	Outcome : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah			850,000,000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	150,000,000		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	85.67	850,000,000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	29083 Paket	4,500,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	850,000,000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	2,200,000,000	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	415 Unit	400,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Ket.
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	200,000,000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	172 Orang	450,000,000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	11000 Paket	500,000,000	Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel			19,600,000,000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	150,000,000		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 Persen	19,600,000,000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	530,000,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	959 Unit	19,600,000,000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	10,600,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	34 Unit	14,000,000,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	50,000,000	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	656 Unit	600,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,600,000,000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	269 Unit	5,000,000,000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	750,000,000	Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum			78,234,594,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,200,000,000		Persentase tertib administrasi dan manajerial Sekretariat Daerah	100 Persen	7,683,652,200	
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Tertatannya Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100 Persen	6,680,000,000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7,683,652,200	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	54 Paket	600,000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	200,000,000	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	80,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32951 Paket	4,474,352,200	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	1,000,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12193 Paket	400,000,000	
	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	5,000,000,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-	-	
	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	5,500,000,000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	429,300,000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1,500,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,980,000,000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1,250,000,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	200,000,000	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	2,750,000,000		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100 Persen	11,650,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Ket.
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Terlaksananya Kegiatan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100 Persen	9,400,000,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	11,650,000,000	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	7,000,000,000	Penyediaan Jasa Surat				
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1,900,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,000,000,000	
	Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,350,000,000	
	Jasa Surat Menyurat				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,300,000,000	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4 Laporan	500,000,000		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik	100 Persen	36,759,252,000	
		Presentase barang milik daerah dalam kondisi baik	100 Persen	39,650,000,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	36,759,252,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	39,650,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	1,250,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	1,200,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	1,800,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	143 Unit	1,700,000,000	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	135,000,000	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit	150,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30,959,252,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	30 Unit	34,000,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	2,615,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	2,600,000,000		Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 Persen	20,759,689,800	
		Presentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100 Persen	30,275,000,000	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang memperoleh respon baik dari penerima layanan	100 Persen	8,028,000,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tingkat Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100 Persen	275,000,000	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	6,300,000,000	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	100,000,000	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1,368,000,000	
	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	175,000,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	360,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Ket.
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan Sarana dan Prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100 Persen	30,000,000,000	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100 Persen	8,020,948,000	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	20 Unit	10,000,000,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	1,178,819,000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1000 Unit	10,000,000,000	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	120 Paket	600,000,000	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1000 Unit	10,000,000,000	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	80,000,000	
		persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bekasi	100 Persen	900,000,000	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	6,162,129,000	
	Penataan Organisasi	Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada pemerintah Kota Bekasi	100 Persen	900,000,000	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	4,710,741,800	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	300,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1,000,000,000	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	300,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1,250,000,000	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	300,000,000	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	2,460,741,800	
		Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	75 Persen	200,000,000		Persentase peningkatan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	40 Persen	1,120,000,000	
	Penataan Organisasi	Persentase peningkatan pemahaman SAKIP Perangkat Daerah	75 Persen	200,000,000	Penataan Organisasi	Persentase layanan Bagian Organisasi yang memperoleh respon baik dari penerima layanan	100 Persen	1,120,000,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	200,000,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	370,000,000	
2	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			54,850,000,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	380,000,000	
		Persentase peningkatan pemahaman IKK LPD pada Perangkat Daerah	75 Persen	900,000,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	370,000,000	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 Persen	900,000,000		Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	100 Persen	262,000,000	
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	900,000,000	Penataan Organisasi	Persentase layanan Bagian Organisasi yang memperoleh respon baik dari penerima layanan	100 Persen	262,000,000	
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	100 Persen	550,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	262,000,000	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 Persen	550,000,000	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT			52,012,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Ket.
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	550,000,000	Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat				
		Presentase peningkatan profile kelurahan	25 Persen	11,000,000,000		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	100 Persen	4,896,000,000	
	Administrasi Tata Pemerintahan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	100 Persen	11,000,000,000	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase layanan Bagian Tata Pemerintahan yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	4,896,000,000	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	6 Dokumen	11,000,000,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		4,896,000,000	
		Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	100 Persen	620,000,000		Presentase peningkatan profile kelurahan	10.71 Persen	3,470,000,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	95 Persen	620,000,000	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase layanan Bagian Tata Pemerintahan yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	3,470,000,000	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	500,000,000	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3,470,000,000	
	Pendokumeantasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	120,000,000		Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	100 Persen	648,000,000	
		Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	95 Persen	950,000,000	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase layanan Bagian Tata Pemerintahan yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	648,000,000	
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Penyelesaian Perkara Yang dihadapi Pemerintah Daerah	100 Persen	950,000,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		648,000,000	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	950,000,000		Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan	100 Persen	4,460,000,000	
		Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan. hari besar Nasional dan hari besar lainnya	100 Persen	6,700,000,000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	4,460,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Fasilitasi Kegiatan Keagamaan, Hari Besar Nasional, dan Hari Besar Lainnya	100 Persen	6,700,000,000	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	4,460,000,000	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	6,700,000,000		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	34,260,000,000	
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	31,200,000,000	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	34,260,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	31,200,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	28,260,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,	1 Dokumen	23,700,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	6,000,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Ket.
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB							
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	7,500,000,000		Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	100 Persen	480,000,000	
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	100 Persen	2,930,000,000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase layanan Bagian Hukum yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	480,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerjasama Pemerintah Daerah	100 Persen	2,930,000,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	360,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	1,500,000,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	120,000,000	
	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1,000,000,000		Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	100 Persen	720,000,000	
	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	70 Laporan	430,000,000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase layanan Bagian Hukum yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	720,000,000	
3	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			8,717,738,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	720,000,000	
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	100 Persen	1,952,320,000		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerja sama Pemerintah Daerah	100 Persen	3,078,000,000	
	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 Persen	1,952,320,000	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase layanan Bagian Kerja Sama yang mendapat respon baik dari penerima layanan (100%)	100 Persen	3,078,000,000	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	350,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	1,500,000,000	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	1,102,320,000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1,000,000,000	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	500,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	65 Laporan	578,000,000	
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	100 Persen	4,790,418,000	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN		100 Persen	5,426,520,320	
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Terselenggaranya Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	100 Persen	4,790,418,000	Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Perekonomian dan Pembangunan				
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	268,646,000		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	100 Persen	1,536,363,000	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	7 Laporan	4,271,772,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase layanan Bagian Perekonomian yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	1,526,363,000	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18 Laporan	250,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	892,863,000	
		Persentase fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	100 Persen	1,975,000,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	283,500,000	

No	Rancangan Awal RKPD				Hasil Analisa Kebutuhan				Ket.
	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	100 Persen	1,975,000,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	350,000,000	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	775,000,000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase tindak lanjut hasil pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)	100 Persen	10,000,000	
	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen	700,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Dardanan Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	1 Dokumen	10,000,000	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	100 Orang	500,000,000		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	100 Persen	2,317,657,320	
					Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase layanan Bagian Administrasi Pembangunan yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	2,317,657,320	
					Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	281,812,520	
					Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	7 Laporan	1,844,594,800	
					Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18 Laporan	191,250,000	
						Tingkat Kematangan UKPEJ	Level 3	1,572,500,000	
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	1,572,500,000	
					Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	607,500,000	
					Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	300 Orang	540,000,000	
					Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	425,000,000	

Sumber Data : Ranwal RKPD Kota Bekasi Tahun 2026 dan Renstra Sekretariat Kota Bekasi 2025-2029

5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sebagai upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, Kementerian Dalam Negeri RI telah memfasilitasi usulan program dan kegiatan dari pemerintah daerah melalui media elektronik berbasis website, yaitu Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD). SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi kinerja pemerintah daerah.

Rancangan rencana kerja Sekretariat Daerah didiskusikan dalam pembahasan forum Perangkat Daerah Kota. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja dengan kesepakatan hasil Musrenbang RKPD di kelurahan. Pada Musrenbang Kelurahan terdapat 13921 Usulan usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah selaku Perangkat Daerah baik dari kelompok masyarakat, LSM, perguruan tinggi dan usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan bersifat masukan atau harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang direncanakan.

Tabel II. 5
 Usulan Program Dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan melalui SIPD RI
 Tahun 2026

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	7	8	9
1	Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	Jl Lumbu Tengah IV/C RT 004 RW 029, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Lapangan Olahraga yang kurang memadai sehingga dibutuhkan peningkatan Lapangan diwilayah	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
2	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Jl Lumbu Tengah Raya Jl Lumbu Tengah III RT 006 dan 001 RW 029, Kota Bekasi	Kota Bekasi	sering terjadinya pengendara sepeda motor yang ugal-ugalan dalam berkendara sehingga dibutuhkan polisi tidur dan kaca cembung diwilayah	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
3	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan	Jl Lumbu Tengah Raya RT 006 dan 001 RW 029, Kota Bekasi	Kota Bekasi	sering terjadinya pengendaraan roda 4 yang ugal-ugalan sehingga dibutuhkan polisi tidur dan kaca cembung diwilayah	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
4	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jl Lumbu Tengah 4/L RT 002 RW 029, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jalan yang rusak sehingga dibutuhkan pengecoran jalan dilingkungan	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
5	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Jl Lumbu Tengah 3/G dan Jl Lumbu Tengah 4 RT 002 RW 029, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Saluran Air yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu pemasangan U-ditch	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
6	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Jl Lumbu Tengah IV/B dan Jl Lumbu Tengah IV/C RT 002 RW 029, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Saluran Air yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu pemasangan U-ditch	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
7	Pembangunan/Renovasi Balai Warga/Kantor Sekretariat	Jl Lumbu Tengah RT 005 RW 027, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Bangunan Gedung Posyandu yang kurang memadai sehingga perlu direnovasi	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
8	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Jl Lumbu Tengah RT 001 dan 003 RW 027, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Saluran Air yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu pemasangan U-ditch	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
9	Pembangunan Saluran Air/Dranase/Gorong Gorong	Jl Lumbu Tengah Raya RT 002 RW 027, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Saluran Air yang tidak berfungsi dengan baik sehingga perlu dibuat Pembangunan Sodetan saluran air	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
10	Pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga	Jl Lumbu Tengah IV/C RT 004 RW 029, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Lapangan Olahraga yang kurang memadai sehingga perlu Peningkatan Lapangan	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
11	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jl Bojong Indah I,II,III,VIII RT 001 s.d 007 RW 011, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Jalan yang Rusak sehingga perlu pengaspalan jalan	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
12	Penurapan/ Tanggul Sungai	Kp. Ciketing Barat, RT 002/001, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Penurapan Makam Parigi	1 Paket	Aspirasi Masyarakat

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	7	8	9
13	Kebutuhan pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Kp. Ciketing Barat, RT 002/001, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung Serbaguna	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
14	Kebutuhan pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Kp. Ciketing Barat, RT 003/001, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Gedung sekretariat RT & RW dan Pos Posyandu	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
15	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Komplek PDK, RT 004/001, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pengecoran Jalan Komplek PDK	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
16	Pembangunan Taman	Jln. PP, RT 001/002, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pembangunan Taman Batas	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
17	Kebutuhan pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Jln. TK Permata Hati, RT 004/002, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pengadaan Lahan Kantor Sekretariat RW	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
18	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jln. Baeturahman, RT 002/002, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Peningkatan Jalan (Pengaspalan)	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
19	Perbaikan Saluran Air/Drainase/Gorong Gorong	Jln. Keman, RT 004/002, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Peningkatan Saluran Uditch 40	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
20	Kebutuhan pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Jln. Masjid Baeturahman, RT 003/002, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pengadaan Lahan Fasos Fasum (Lapangan)	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
21	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jln. Rawa Tepus, RT 001/004, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Peningkatan Jalan Lingkungan (Pengaspalan)	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
22	Kebutuhan pengadaan lahan untuk kepentingan umum	Jln. Masjid Nurul Insan, RT 002/004, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pengadaan Lahan Kantor Sekretariat RW 004	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
23	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jln. H. Katut, RT 002/004, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Peningkatan Jalan Lingkungan (Pengaspalan)	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
24	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jln. Delima, RT 003/004, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Peningkatan Jalan Lingkungan (Pengaspalan)	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
25	Pemasangan Lampu PJU	Jln. Nenta - Jln. Kecapi, RT 003/004, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pemasangan Lampu PJU	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
26	Penurapan/ Tanggul Sungai	Kp. Ciketing Timur, RT 003/005, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Normalisasi dan Penurapan Rawa Gempol	1 Paket	Aspirasi Masyarakat
13911	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	RT 05 RW 013 Kel. Mustikajaya, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Hibah RT 05 RW 013 Kel. Mustikajaya, Kec. Mustikajaya	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD
13912	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	PKK RW 023 Pesona Bumiagarakel. Mustikajaya, Kec. Mustikajaya, Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Hibah PKK RW 023 Pesona Bumiagarakel. Mustikajaya, Kec. Mustikajaya	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	7	8	9
13913	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Perum Padawa Residence Blok B no.2, Jl. Pangkalan II Gg.Blaung Rt.04 / 03 kel.Cikiwul, kec. Bantargebang, Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Hibah Majelis Talim Wanita PUI An- Nisa Perum Padawa Residence Blok B no.2, Jl Pangkalan II Bg Blaung RT 04 RW 03 Kel. Cikiwul, Kec. Bantargebang	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD
13914	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Perum Grand Bekasi, jl. Apel merah II RT.06 RW.19 kel. Padurenan, mustikajaya , Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Hibah Majelis Talim Wanita PUI Mardhotillah Perum Grand Bekasi, jl. Apel merah II RT.06 RW.19 kel. Padurenan, mustikajaya	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD
13915	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	Gg. Cendana, RT.02 RW.01, Kel.Cikiwul Kec.Bantargebang, Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Hibah Majelis Talim Wanita PUI An - Nur Alamant Gg. Cendana, RT.02 RW.01, Kel.Cikiwul Kec.Bantargebang	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD
13916	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	kel. Mustikajaya, Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Hibah Karang Taruna Kecamatan Mustika Jaya. Kel/Kec. Mustika Jaya	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD
13917	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	RW 023 Pesona Bumiayagara Kel. Mustikajaya Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Hibah RW 023 Pesona Bumiayagara Kel. Mustikajaya Kec. Mustika Jaya	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD
13918	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	RT 013 RW 007 PTI Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya, Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Hibah RT 013 RW 007 PTI Kel. Mustika Sari Kec. Mustika Jaya	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD
13919	Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	Rw 05 Jakasetia , Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pembangunan lanjutan posyandu Alamanda Rw 05 Jakasetia	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD
13920	Hibah uang kepada RT/RW untuk pengadaan sarana prasarana penunjang Kantor RT/RW Non Konstruksi	Jalan Matoa RW.8 Kel.Jatiluhur Kec.Jatiasih, Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Hibah RT 06 RW 23 Pesona Bumiayagara Kel. Musikajaya Kec. Mustika Jaya	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD
13921	Pengaspalan/Pengecoran Jalan	Jalan Utama A RW.8 Kel.Jatiluhur Kec.Jatiasih , Kota Bekasi, Kota Bekasi	Kota Bekasi	Pengaspalan Jalan Utama A RW.8 Kel.Jatiluhur Kec.Jatiasih sepanjang 200 m	1 Paket	Pokok Pikiran DPRD

Sumber: Aplikasi SIPD RI (<https://sipd-ri.kemendagri.go.id/>)



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BEKASI

Bab III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Pada RPJMN 2025-2029, yang dituangkan dalam Perpres No.12 Tahun 2025 Selanjutnya, pembangunan nasional ke depan akan berpedoman pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden dan disusun berdasarkan RPJP Nasional 2025-2045. RPJM Nasional memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Hal ini akan menjadi panduan strategis dalam mencapai target pembangunan nasional demi mewujudkan Indonesia yang maju, inklusif, dan berkelanjutan

Arah kebijakan nasional yang menjadi tema pembangunan nasional tahun 2026 sebagaimana tertuang di dalam RKP Tahun 2026 adalah **“Kedaulatan Pangan, Energi, serta Ekonomi yang Produktif serta Inklusif”** dengan delapan prioritas nasional antara lain:

1. memperkuat ideologi pancasila, demokrasi, dan Hak Azasi Manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertanahan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan prestasi olahraga, kesetaraan gender

- serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
 6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
 7. memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan;
 8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Selanjutnya RPJMN 2025-2029 juga memuat 17 Program Prioritas Presiden, yaitu :

1. Mencapai swasembada pangan, energi dan air
2. Penyempurnaan Sistem Penerimaan Negara
3. Reformasi hukum, politik dan birokrasi
4. Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
5. Pemberantasan Kemiskinan
6. Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia: peningkatan BPJS Kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat
8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi serta digitalisasi
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif
10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas
11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup
12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani
13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan

14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatifkarakteristik-mandiri lainnya
15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis sumber daya alam (SDA) termasuk termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi
16. Memastikan kerukunan antarumat beragama, kebebasan beribadah, pendirian dan perawatan rumah ibadah
17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olah raga.

Renja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 ini disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bekasi Tahun 2026, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan daerah Kota Bekasi Tahun 2026, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Bekasi Tahun 2025-2029.

Visi yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi periode 2025-2029 adalah “Kota Bekasi yang Nyaman dan Sejahtera”, visi ini merupakan gambaran ideal kondisi yang diinginkan untuk dicapai dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan mempertimbangkan isu strategis, sasaran visi, dan sasaran pokok RPJPD.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Bekasi di atas, rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Kota Bekasi terangkum dalam 5 (lima) misi. Ke-5 (lima) misi tersebut dijabarkan sebagaimana berikut :

1. Meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan publik perkotaan yang semakin memuaskan dengan didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai;
2. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan lingkungan kehidupan perkotaan, baik jasmani maupun rohani, yang semakin kondusif dan berkelanjutan;

3. Membuka lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya didukung dengan pengembangan ruang-ruang inovasi dan kreativitas generasi produktif dalam memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi Pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat;
5. Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren.

Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Sekretariat Daerah mendukung kepada misi pembangunan ke-4 dan ke-5 (Mengembangkan iklim yang kondusif dan kemudahan bagi investasi Pembangunan dan dunia usaha yang berkeadilan rakyat dan Mengembangkan kolaborasi strategis dan dukungan penguatan manajemen pemerintahan kota yang mendorong Kota Bekasi sebagai kota bertaraf internasional yang keren) namun sesuai kedudukan Sekretariat Daerah pada Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2024 sebagai unsur staf pendukung Wali Kota yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya selain mendukung pelaksanaan misi pembangunan ke-4 dan ke-5 Sekretariat daerah juga akan mendukung kepada pelaksanaan misi pembangunan ke-1, 2, dan 3.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kota Bekasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dibentuk untuk melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan sehingga program kegiatan di Sekretariat Daerah mendukung kepada tujuan Meningkatkan akuntabilitas dan profesionalisme pengelolaan layanan pemerintah dengan sasaran dan indikator sasaran diuraikan sebagaimana berikut :

Tabel III. 1
 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi pelayanan publik	-	Persentase perangkat daerah yang mendapatkan nilai evaluasi Reformasi Birokrasi dengan predikat memuaskan	40,91%
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Persentase OPD yang menerapkan SAKIP Berkualitas	30.2%
		Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	Persentase Capaian IKK yang meningkat	50.2%
			Indeks Kerja Sama Kota (IKSK)	87.7
		Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Indeks Pelaksanaan Pembangunan	88.9%

Sumber: Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kota Bekasi 2025-2029

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Rumusan Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026, ditetapkan dengan mengacu pada Tujuan dan Sasaran serta program prioritas sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2025-2029 pada tahun berkenaan serta penetapan Renstra Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2025-2028 maka, program dan kegiatan pada Sekretariat Kota Bekasi menitikberatkan pada Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi pelayanan publik.

Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026, antara lain meliputi: 3 (tiga) program yang dijabarkan dalam 24 (dua puluh empat) kegiatan dan 60 (enam puluh) sub kegiatan dengan pagu indikatif sebesar Rp 225,305,271,320.00 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi Tahun Anggaran 2026. Sementara sebaran lokasi dari program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan, paling banyak terdapat di

Sekitar Kecamatan Bekasi Selatan dengan kelompok sasaran utama merupakan OPD dan aparatur Pemerintah Kota Bekasi, ini dikarenakan Sekretariat Daerah sebagai Perangkat Daerah perumusan kebijakan Daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah serta pembinaan administratif perangkat daerah.

Untuk lebih jelasnya, Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Sekretariat Daerah pada Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III. 2
 Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1					2
4					Sekretariat Daerah
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA
4	1	1			
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
4	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah
4	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4	1	1	2.06	5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
4	1	1	2.06	6	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4	1	1	2.06	8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
4	1	1	2.06	9	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
4	1	1	2.06	10	Fasilitasi Kunjungan Tamu
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1					2
4	1	1	2.11	2	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.11	3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.11	4	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.12		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah
4	1	1	2.12	1	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah
4	1	1	2.12	2	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah
4	1	1	2.12	3	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan
4	1	1			
4	1	1	2.11		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
4	1	1	2.11	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
4	1	1	2.11	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	1	1	2.11	4	Pemeliharaan Mebel
4	1	1	2.12		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
4	1	1	2.12	1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
4	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
4	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel
4	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
4	1	1			
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah
4	1	2	2.03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1					2
4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerja Sama Daerah
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian
4	1	3	2.01	1	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian
4	1	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

Sekretariat Daerah sebagai pengoordinasian penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif, juga berkomitmen dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dengan memperhatikan aspek yang terkait dengan Pengarus Utamaan Gender (PUG). Sekretariat Daerah berkomitmen terhadap penerapan PUG dengan memberikan akses, peran/partisipasi, control dan manfaat yang adil antara laki – laki dan perempuan dalam pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan tidak terjadinya kesenjangan / bias gender. Sejumlah aktivitas yang mencerminkan penerapan PUG diantaranya adalah dengan memberikan proporsi keterwakilan laki – laki dan perempuan dalam beberapa sub kegiatan yaitu:

1. Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual melalui : Pelaksanaan MTQ tingkat Kota Bekasi, Pelaksanaan MTQ tingkat, Penyelenggaraan Hari-hari besar Keagamaan
2. Fasilitasi Keprotokolan melalui : Penyelenggaraan Hari-hari Besar Nasional.
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah : melibatkan seluruh ASN Sekretariat Daerah Kota Bekasi baik laki-laki maupun perempuan dalam setiap tahapan perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan.
4. Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi : sosialisasi terkait pelaksanaan reformasi birokrasi untuk peningkatan pemahaman bagi ASN Pemerintah Kota Bekasi.
5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan, Pengadaan Mebel dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan laki-laki, serta memenuhi kebutuhan praktis dan strategis gender.
Selain itu fasilitas kantor yang responsive gender yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah antara lain:
 - **Toilet terpisah:** Toilet yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, serta toilet untuk penyandang disabilitas.
 - **Ruang menyusui:** Ruangan yang nyaman dan privasi bagi ibu menyusui untuk memompa ASI atau menyusui bayinya.
 - **Fasilitas ibadah:** Mushola atau tempat ibadah yang terpisah untuk laki-laki dan perempuan, serta fasilitas untuk penyandang disabilitas.
 - **Parkir prioritas:** Area parkir yang didedikasikan untuk ibu hamil, lansia, dan penyandang disabilitas.
 - **Aksesibilitas:** Jalur dan lift yang mudah diakses oleh penyandang disabilitas.
 - **Desain interior yang inklusif:** Pemilihan warna, furnitur, dan dekorasi yang tidak bias gender.

Tabel III. 3
 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi
 Tahun 2026 Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sum ber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Sekretariat Daerah				225,305,271,320			236,976,084,375
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				225,305,271,320			236,976,084,375
4.01	SEKRETARIAT DAERAH				225,305,271,320			236,976,084,375
4.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				167,866,751,000			176,562,248,702
	Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran				160,000,000			200,000,000
		Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran		100 Persen	160,000,000		100 Persen	200,000,000
4.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah		100 Persen	160,000,000		100 Persen	200,000,000
4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Bekasi	21 Dokumen	160,000,000	APBD	21 Dokumen	200,000,000
	Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan				69,022,157,000			70,050,000,000
		Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan		100 Persen	69,022,157,000		100 Persen	70,050,000,000
4.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Sesuai Ketentuan		100 Persen	69,022,157,000		100 Persen	70,050,000,000
4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Bekasi	9520 Orang/ bulan	68,972,157,000	APBD	9520 Orang/ bulan	70,000,000,000
4.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan	Kota Bekasi	16 Laporan	50,000,000	APBD	16 Laporan	50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						
	Outcome : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah				850,000,000			950,000,000
		Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah		85.67	850,000,000		85,75	950,000,000
4.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	850,000,000		100 Persen	950,000,000
4.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kota Bekasi	415 Unit	400,000,000	APBD	415 Unit	500,000,000
4.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Kota Bekasi	172 Orang	450,000,000	APBD	172 Orang	450,000,000
	Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel				19,600,000,000			25,000,000,000
		Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel		100 Persen	19,600,000,000		100 Persen	25,000,000,000
4.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		959 Unit	19,600,000,000		959 Unit	25,000,000,000
4.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kota Bekasi	34 Unit	14,000,000,000	APBD	34 Unit	14,000,000,000
4.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kota Bekasi	656 Unit	600,000,000	APBD	656 Unit	1,000,000,000
4.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kota Bekasi	269 Unit	5,000,000,000	APBD	269 Unit	10,000,000,000
	Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum				78,234,594,000			80,362,248,702

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase tertib administrasi dan manajerial Sekretariat Daerah		100 Persen	7,683,652,200		100 Persen	8,400,000,000
4.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 Persen	7,683,652,200		100 Persen	8,400,000,000
4.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	60 Paket	200,000,000	APBD	60 Paket	200,000,000
4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	32951 Paket	4,474,352,200	APBD	32951 Paket	5,000,000,000
4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Bekasi	12193 Paket	400,000,000	APBD	12193 Paket	400,000,000
4.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kota Bekasi	2 Dokumen		APBD	2 Dokumen	100,000,000
4.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Bekasi	2 Laporan	429,300,000	APBD	2 Laporan	500,000,000
4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Bekasi	1 Laporan	1,980,000,000	APBD	1 Laporan	2,000,000,000
4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kota Bekasi	1 Dokumen	200,000,000	APBD	1 Dokumen	200,000,000
		Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan		100 Persen	11,650,000,000		100 Persen	9,855,000,000
4.01.01.2.11	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan		100 Persen	11,650,000,000		100 Persen	9,855,000,000
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Bekasi				1 Laporan	5,000,000
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	8,000,000,000	APBD	12 Laporan	8,000,000,000
4.01.01.2.11.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	1,350,000,000	APBD	12 Laporan	1,350,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Laporan	2,300,000,000	APBD	12 Laporan	500,000,000
		Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik		100 Persen	36,759,252,000		100 Persen	39,550,000,000
4.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100 Persen	36,759,252,000		100 Persen	39,550,000,000
4.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Bekasi	25 Unit	1,250,000,000	APBD	25 Unit	1,500,000,000
4.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota Bekasi	155 Unit	1,800,000,000	APBD	155 Unit	1,800,000,000
4.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Kota Bekasi	50 Unit	135,000,000	APBD	50 Unit	150,000,000
4.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	30 Unit	30,959,252,000	APBD	30 Unit	33,500,000,000
4.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Bekasi	21 Unit	2,615,000,000	APBD	21 Unit	2,600,000,000
		Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah		100 Persen	20,759,689,800		100 Persen	21,107,248,702
4.01.01.2.14	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Persentase layanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang memperoleh respon baik dari penerima layanan		100 Persen	8,028,000,000		100 Persen	8,500,000,000
4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kota Bekasi	1 Laporan	6,300,000,000	APBD	1 Laporan	6,500,000,000
4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kota Bekasi	1 Laporan	1,368,000,000	APBD	1 Laporan	1,500,000,000
4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kota Bekasi	1 Laporan	360,000,000	APBD	1 Laporan	500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sum ber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi		100 Persen	8,020,948,000		100 Persen	8,137,248,702
4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bekasi	24 Orang/Bulan	1,178,819,000	APBD	24 Orang/Bulan	1,257,248,702
4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bekasi	120 Paket	600,000,000	APBD	120 Paket	600,000,000
4.01.01.2.11.0003	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bekasi	4 Orang	80,000,000	APBD	4 Orang	80,000,000
4.01.01.2.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kota Bekasi	24 Orang/Bulan	6,162,129,000	APBD	24 Orang/Bulan	6,200,000,000
4.01.01.2.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Tingkat Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah		100 Persen	4,710,741,800		100 Persen	4,470,000,000
4.01.01.2.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Paket	1,000,000,000	APBD	12 Paket	1,060,000,000
4.01.01.2.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Paket	1,250,000,000	APBD	12 Paket	910,000,000
4.01.01.2.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	Kota Bekasi	12 Paket	2,460,741,800	APBD	12 Paket	2,500,000,000
		Persentase peningkatan kualitas SAKIP Perangkat Daerah		40 Persen	1,120,000,000		40 Persen	1,150,000,000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase layanan Bagian Organisasi yang memperoleh respon baik dari penerima layanan		100 Persen	1,120,000,000		100 Persen	1,150,000,000
4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kota Bekasi	2 Dokumen	370,000,000	APBD	2 Dokumen	350,000,000
4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kota Bekasi	2 Laporan	380,000,000	APBD	2 Laporan	400,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kota Bekasi	1 Dokumen	370,000,000	APBD	1 Dokumen	400,000,000
		Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi		100 Persen	262,000,000		100 Persen	300,000,000
4.01.01.2.13	Penataan Organisasi	Persentase layanan Bagian Organisasi yang memperoleh respon baik dari penerima layanan		100 Persen	262,000,000		100 Persen	300,000,000
4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kota Bekasi	1 Dokumen	262,000,000	APBD	1 Dokumen	300,000,000
4.01.02	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT				52,012,000,000			54,706,221,600
	Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat							
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan		100 Persen	4,896,000,000		100 Persen	750,000,000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase layanan Bagian Tata Pemerintahan yang mendapat respon baik dari penerima layanan		100 Persen	4,896,000,000		100 Persen	750,000,000
4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kota Bekasi		4,896,000,000	APBD		750,000,000
		Presentase peningkatan profile kelurahan		10.71 Persen	3,470,000,000		10.71 Persen	5,000,000,000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase layanan Bagian Tata Pemerintahan yang mendapat respon baik dari penerima layanan		100 Persen	3,470,000,000		100 Persen	5,000,000,000
4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kota Bekasi		3,470,000,000	APBD		5,000,000,000
		Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah		100 Persen	648,000,000		100 Persen	1,000,000,000
4.01.02.2.01	Administrasi Tata Pemerintahan	Persentase layanan Bagian Tata Pemerintahan yang mendapat respon baik dari penerima layanan		100 Persen	648,000,000		100 Persen	1,000,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			648,000,000	APBD		1,000,000,000
		Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan		100 Persen	4,460,000,000		100 Persen	5,006,221,600
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mendapat respon baik dari penerima layanan		100 Persen	4,460,000,000		100 Persen	5,006,221,600
4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kota Bekasi	7 Dokumen	4,460,000,000	APBD	7 Dokumen	5,006,221,600
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial		100 Persen	34,260,000,000		100 Persen	37,500,000,000
4.01.02.2.02	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Persentase layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mendapat respon baik dari penerima layanan		100 Persen	34,260,000,000		100 Persen	37,500,000,000
4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kota Bekasi	1 Dokumen	28,260,000,000	APBD	1 Dokumen	30,000,000,000
4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kota Bekasi	1 Dokumen	6,000,000,000	APBD	1 Dokumen	7,500,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	Kota Bekasi	100 Persen	480,000,000		100 Persen	850,000,000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase layanan Bagian Hukum yang mendapat respon baik dari penerima layanan	Kota Bekasi	100 Persen	480,000,000		100 Persen	850,000,000
4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kota Bekasi	1 Dokumen	360,000,000		1 Dokumen	650,000,000
4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kota Bekasi	3 Dokumen	120,000,000		3 Dokumen	200,000,000
		Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah		100 Persen	720,000,000		100 Persen	1,000,000,000
4.01.02.2.03	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase layanan Bagian Hukum yang mendapat respon baik dari penerima layanan		100 Persen	720,000,000		100 Persen	1,000,000,000
4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	Kota Bekasi	8 Kasus	720,000,000	APBD	8 Kasus	1,000,000,000
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerja sama Pemerintah Daerah		100 Persen	3,078,000,000		100 Persen	3,600,000,000
4.01.02.2.04	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase layanan Bagian Kerja Sama yang mendapat respon baik dari penerima layanan (100%)		100 Persen	3,078,000,000		100 Persen	3,600,000,000
4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kota Bekasi	4 Dokumen	1,500,000,000	APBD	4 Dokumen	1,500,000,000
4.01.02.2.04.0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kota Bekasi	1 Dokumen	1,000,000,000	APBD	1 Dokumen	1,500,000,000
4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kota Bekasi	65 Laporan	578,000,000	APBD	65 Laporan	600,000,000
4.01.03	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN			100 Persen	5,426,520,320		100 Persen	5,707,614,073
	Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Perekonomian dan Pembangunan							
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi		100 Persen	1,536,363,000		100 Persen	1,557,614,073

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.03.2.01	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase layanan Bagian Perekonomian yang mendapat respon baik dari penerima layanan		100 Persen	1,526,363,000		100 Persen	1,547,614,073
4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kota Bekasi	4 Dokumen	892,863,000	APBD	4 Dokumen	907,614,073
4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kota Bekasi	1 Laporan	283,500,000	APBD	1 Laporan	300,000,000
4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kota Bekasi	1 Dokumen	350,000,000	APBD	1 Dokumen	340,000,000
4.01.03.2.04	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Persentase tindak lanjut hasil pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)		100 Persen	10,000,000		100 Persen	10,000,000
4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Dardanan Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kota Bekasi	1 Dokumen	10,000,000	APBD	1 Dokumen	10,000,000
		Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan		100 Persen	2,317,657,320		100 Persen	2,400,000,000
4.01.03.2.02	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase layanan Bagian Administrasi Pembangunan yang mendapat respon baik dari penerima layanan		100 Persen	2,317,657,320		100 Persen	2,400,000,000
4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kota Bekasi	4 Dokumen	281,812,520		4 Dokumen	300,000,000
4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kota Bekasi	7 Laporan	1,844,594,800		7 Laporan	1,850,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Rencana Tahun 2026		Sumber Dana	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
				Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kota Bekasi	18 Laporan	191,250,000		18 Laporan	250,000,000
		Tingkat Kematangan UKPBJ		Level 3	1,572,500,000		Level 3	1,750,000,000
4.01.03.2.03	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase layanan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mendapat respon baik dari penerima layanan		100 Persen	1,572,500,000		100 Persen	1,750,000,000
4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bekasi	1 Dokumen	607,500,000	APBD	1 Dokumen	700,000,000
4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kota Bekasi	300 Orang	540,000,000	APBD	1 Dokumen	650,000,000
4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kota Bekasi	300 Orang	425,000,000	APBD	300 Orang	400,000,000



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026 diperlukan rumusan program/kegiatan. Rumusan Rencana Kerja dan Pendanaan Sekretariat Daerah Kota Bekasi secara detail kami sajikan pada tabel 4.1

Tabel IV. 1
 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat Daerah Kota Bekasi Tahun 2026
 Sekretariat Daerah Kota Bekasi

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan berorientasi pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja	Sekretariat Daerah				225,305,271,320	
		UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4			225,305,271,320	
		SEKRETARIAT DAERAH	4.01			225,305,271,320	
	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.01.01			167,866,751,000	
	Meningkatnya efektifitas tata kelola pemerintahan bidang perekonomian dan pembangunan	Outcome: Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran				160,000,000	
				Persentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah dengan Penganggaran	100 Persen	160,000,000	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4.01.01.2.01	Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah	100 Persen	160,000,000	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.01.01.2.01.0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	21 Dokumen	160,000,000	TU
		Outcome: Meningkatnya Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan				69,022,157,000	
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan Penunjang Urusan	100 Persen	69,022,157,000	

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.01.01.2.02	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Sesuai Ketentuan	100 Persen	69,022,157,000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.01.01.2.02.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	9520 Orang/bulan	68,972,157,000	TU
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	4.01.01.2.02.0007	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan ulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	16 Laporan	50,000,000	TU
		Outcome : Meningkatnya Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Perangkat Daerah				850,000,000	
				Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil (IP ASN) Perangkat Daerah	85.67	850,000,000	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	4.01.01.2.05	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	850,000,000	
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	4.01.01.2.05.0001	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	415 Unit	400,000,000	TU
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	4.01.01.2.05.0009	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	172 Orang	450,000,000	TU
		Outcome : Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel				19,600,000,000	
				Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Akuntabel	100 Persen	19,600,000,000	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.01.01.2.07	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	959 Unit	19,600,000,000	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.01.01.2.07.0002	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	34 Unit	14,000,000,000	Umum
		Pengadaan Mebel	4.01.01.2.07.0005	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	656 Unit	600,000,000	Umum
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.01.01.2.07.0011	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	269 Unit	5,000,000,000	Umum

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Administrasi Umum				78,234,594,000	
				Persentase tertib administrasi dan manajerial Sekretariat Daerah	100 Persen	7,683,652,200	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.01.01.2.06	Persentase Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	7,683,652,200	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	4.01.01.2.06.0001	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60 Paket	200,000,000	Umum
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	4.01.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	32951 Paket	4,474,352,200	Umum
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	4.01.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12193 Paket	400,000,000	Umum
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.01.01.2.06.0006	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		Prokopim
		Fasilitasi Kunjungan Tamu	4.01.01.2.06.0008	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan	429,300,000	Prokopim
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4.01.01.2.06.0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1,980,000,000	TU
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	4.01.01.2.06.0010	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	200,000,000	TU
				Persentase Ketersediaan sarana dan prasarana aparatur sesuai dengan kebutuhan	100 Persen	11,650,000,000	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.11	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100 Persen	11,650,000,000	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.01.01.2.11.0001	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			TU
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	4.01.01.2.11.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	8,000,000,000	Umum
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.01.01.2.11.0003	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,350,000,000	Umum
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.01.01.2.11.0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,300,000,000	Umum

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				Persentase Barang Milik Daerah dalam kondisi Baik	100 Persen	36,759,252,000	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.01.01.2.09	Tingkat Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	36,759,252,000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4.01.01.2.09.0001	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit	1,250,000,000	Umum
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4.01.01.2.09.0002	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	155 Unit	1,800,000,000	Umum
		Pemeliharaan Mebel	4.01.01.2.09.0005	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit	135,000,000	Umum
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	4.01.01.2.09.0009	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	30,959,252,000	Umum
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	4.01.01.2.09.0011	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	21 Unit	2,615,000,000	Umum
				Persentase Pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah	100 Persen	20,759,689,800	
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14	Persentase layanan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan yang memperoleh respon baik dari penerima layanan	100 Persen	8,028,000,000	
		Fasilitasi Keprotokolan	4.01.01.2.14.0001	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan	6,300,000,000	Prokopim
		Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	4.01.01.2.14.0002	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan	1,368,000,000	Prokopim
		Pendokumentasian Tugas Pimpinan	4.01.01.2.14.0003	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan	360,000,000	Prokopim
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11	Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpenuhi	100 Persen	8,020,948,000	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0001	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	1,178,819,000	Prokopim

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0002	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	120 Paket	600,000,000	Umum
		Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0003	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4 Orang	80,000,000	Umum
		Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.11.0004	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/Bulan	6,162,129,000	Prokopim
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12	Tingkat Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100 Persen	4,710,741,800	
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	4.01.01.2.12.0001	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1,000,000,000	Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	4.01.01.2.12.0002	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket	1,250,000,000	Umum
		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	4.01.01.2.12.0003	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket	2,460,741,800	Umum
				Persentase peningkatan kualitas SAKIP Perangkat Daerah	40 Persen	1,120,000,000	
		Penataan Organisasi	4.01.01.2.13	Persentase layanan Bagian Organisasi yang memperoleh respon baik dari penerima layanan	100 Persen	1,120,000,000	
		Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	4.01.01.2.13.0001	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	2 Dokumen	370,000,000	Organisasi
		Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	4.01.01.2.13.0002	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Laporan	380,000,000	Organisasi
		Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	4.01.01.2.13.0003	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	1 Dokumen	370,000,000	Organisasi
				Persentase keterlaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi pada Pemerintah Kota Bekasi	100 Persen	262,000,000	
		Penataan Organisasi	4.01.01.2.13	Persentase layanan Bagian Organisasi yang memperoleh respon baik dari penerima layanan	100 Persen	262,000,000	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	4.01.01.2.13.0005	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Dokumen	262,000,000	Organisasi

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.02			52,012,000,000	
		Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat					
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan bidang pemerintahan	100 Persen	4,896,000,000	
		Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01	Persentase layanan Bagian Tata Pemerintahan yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	4,896,000,000	
		Penataan Administrasi Pemerintahan	4.01.02.2.01.0001	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan		4,896,000,000	Tapem
				Persentase peningkatan profile kelurahan	10.71 Persen	3,470,000,000	
		Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01	Persentase layanan Bagian Tata Pemerintahan yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	3,470,000,000	
		Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	4.01.02.2.01.0002	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan		3,470,000,000	Tapem
				Persentase peningkatan pemahaman IKK LPPD pada Perangkat Daerah	100 Persen	648,000,000	
		Administrasi Tata Pemerintahan	4.01.02.2.01	Persentase layanan Bagian Tata Pemerintahan yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	648,000,000	
		Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	4.01.02.2.01.0003	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah		648,000,000	Tapem
				Persentase Fasilitasi kegiatan keagamaan	100 Persen	4,460,000,000	
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02	Persentase layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	4,460,000,000	
		Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	4.01.02.2.02.0001	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7 Dokumen	4,460,000,000	Kesra
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kesejahteraan Sosial	100 Persen	34,260,000,000	

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	4.01.02.2.02	Persentase layanan Bagian Kesejahteraan Rakyat yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	34,260,000,000	
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial	4.01.02.2.02.0002	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	1 Dokumen	28,260,000,000	Kesra
		Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat	4.01.02.2.02.0003	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	1 Dokumen	6,000,000,000	Kesra
				Persentase Peraturan Perundang-undangan dan Produk Hukum Daerah yang diundangkan	100 Persen	480,000,000	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03	Persentase layanan Bagian Hukum yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	480,000,000	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	4.01.02.2.03.0001	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1 Dokumen	360,000,000	Hukum
		Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	4.01.02.2.03.0003	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	3 Dokumen	120,000,000	Hukum
				Persentase penyelesaian perkara yang dihadapi pemerintah daerah	100 Persen	720,000,000	
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	4.01.02.2.03	Persentase layanan Bagian Hukum yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	720,000,000	
		Fasilitasi Bantuan Hukum	4.01.02.2.03.0002	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	8 Kasus	720,000,000	Hukum
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Kerja sama Pemerintah Daerah	100 Persen	3,078,000,000	

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	4.01.02.2.04	Persentase layanan Bagian Kerja Sama yang mendapat respon baik dari penerima layanan (100%)	100 Persen	3,078,000,000	
		Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4.01.02.2.04.0001	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	4 Dokumen	1,500,000,000	Kerja Sama
		Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	4.01.02.2.04.0002	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	1 Dokumen	1,000,000,000	Kerja Sama
		Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	4.01.02.2.04.0003	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	65 Laporan	578,000,000	Kerja Sama
		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.03		100 Persen	5,426,520,320	
		Outcome: Meningkatnya Tata Kelola Bidang Perekonomian dan Pembangunan					
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Ekonomi	100 Persen	1,536,363,000	
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01	Persentase layanan Bagian Perekonomian yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	1,526,363,000	
		Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4.01.03.2.01.0001	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen	892,863,000	Perekonomian
		Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4.01.03.2.01.0002	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	1 Laporan	283,500,000	Perekonomian
		Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4.01.03.2.01.0003	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	1 Dokumen	350,000,000	Perekonomian
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	4.01.03.2.04	Persentase tindak lanjut hasil pemantauan kebijakan Sumber Daya Alam (SDA)	100 Persen	10,000,000	
		Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan	4.01.03.2.04.0001	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Dardanan Perdagangan, Perindustrian,	1 Dokumen	10,000,000	Perekonomian

Tujuan	Sasaran	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Kode	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7	8
				KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja			
				Cakupan perumusan dan pengendalian kebijakan Pembangunan	100 Persen	2,317,657,320	
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	4.01.03.2.02	Persentase layanan Bagian Administrasi Pembangunan yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	2,317,657,320	
		Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	4.01.03.2.02.0001	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	4 Dokumen	281,812,520	Adbang
		Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4.01.03.2.02.0002	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	7 Laporan	1,844,594,800	Adbang
		Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	4.01.03.2.02.0003	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	18 Laporan	191,250,000	Adbang
				Tingkat Kematangan UKPBJ	Level 3	1,572,500,000	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03	Persentase layanan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa yang mendapat respon baik dari penerima layanan	100 Persen	1,572,500,000	
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0001	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen	607,500,000	PBJ
		Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	4.01.03.2.03.0002	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	300 Orang	540,000,000	PBJ
		Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	4.01.03.2.03.0003	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	300 Orang	425,000,000	PBJ



BAB V

PENUTUP

KANTOR WALIKOTA BEKASI

Bab V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kota Bekasi mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana dalam penyusunannya Kegiatan, indikator, target kinerja, dan pagu anggaran disusun dalam matrik dan bersifat indikatif untuk tahun disusun dan menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen penganggaran (Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran).

5.1 Catatan Penting Dalam Penyusunan Renja

Dalam pelaksanaan kebijaksanaan, program dan kegiatan yang diarahkan pada sasaran dan tujuan dengan mengacu pada Rencana Strategis Sekretariat Daerah tahun 2025-2029 harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, baik untuk kegiatan administrasi umum yang bersifat rutin maupun kegiatan pembangunan. Upaya Sekretariat Daerah pada tahun 2026 ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dengan berbagai hambatan dan kendala, harus mampu meningkatkan capaian kinerja secara keseluruhan lebih optimal dengan menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

5.2 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Sebagai upaya dalam rangka menjamin terlaksananya program dan kegiatan, serta untuk mewujudkan sinergitas kinerja pembangunan diantara seluruh pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh aparatur di lingkungan Sekretariat Kota Bekasi berkewajiban untuk melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Sekretariat Kota Bekasi Tahun 2026 secara efektif dan efisien;
2. Dalam pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang tertuang dalam Renja ini wajib mengikuti prinsip-prinsip pengarusutamaan yaitu: (1) pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan; (2) pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik; dan (3) pengarusutamaan gender;
3. Renja Sekretariat Kota Bekasi Tahun 2026 merupakan dasar penyusunan anggaran tahun 2026 yang dijabarkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA);
4. Masyarakat luas dapat berperan serta seluas-luasnya dalam pelaksanaan program-program pembangunan berdasarkan rancangan peran serta masyarakat dalam kegiatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masyarakat luas juga dapat berperan serta dalam pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan kegiatan dalam program-program pembangunan;
5. Untuk menjaga efektivitas pelaksanaan program, kegiatan dan subkegiatan, Sekretaris Daerah beserta seluruh aparatur Sekretariat berkewajiban melakukan pemantauan pelaksanaan Renja dan melakukan tindakan koreksi yang diperlukan, dan melaporkan hasil-hasil pemantauan secara berkala kepada Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Tata cara penyusunan Renja Sekretariat Kota Bekasi Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Demikian Rencana Kerja Tahun 2026 disusun, semoga dapat dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi Sekretaris Daerah Kota Bekasi dalam menjalankan tugas dan fungsi OPD.